

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil di atas, berikut disampaikan kesimpulan dan saran:

1. Penelitian terkait hasil Evaluasi Kinerja Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Program Prioritas Nasional menunjukkan bahwa kebijakan program ini sudah dijalankan dengan cukup baik dan dapat dilanjutkan, namun begitu masih ada catatan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini karena ternyata berdasarkan temuan di lapangan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat disamaratakan untuk dapat mudah diterapkan disemua wilayah Indonesia, dalam menerapkan kebijakan ini harus memperhatikan nilai budaya, norma adat, norma agama, serta karakteristik penduduknya. Sehingga diperlukan kajian ulang untuk keberhasilan dan kemaksimalan dari tujuan program peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan tersebut.
2. Dengan menggunakan teori William Dunn tentang enam kriteria yang dapat mengukur tingkat kinerja kebijakan publik, terdapat tiga kriteria yang dapat menilai kinerja kebijakan kepemimpinan perempuan perdesaan dengan membandingkan diantara kedua wilayah yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ternyata di lapangan masih terdapat beberapa kelemahan:
  - a. Kriteria Efektivitas

Keberhasilan penerapan kebijakan terletak pada (salah satunya) keterlibatan, komunikasi, dan koordinasi. Agar efektivitas kebijakan berjalan dengan baik, maka “standar dan tujuan dari program/ kebijakan” ini seharusnya sudah dipahami oleh pihak-pihak yang mempunyai peran dan tanggung jawabnya atas pencapaian kebijakan ini. Karenanya penting untuk memperhatikan

tujuan dari kebijakan ini maka keterlibatan antar pihak ini dibutuhkan keseragaman pemahaman, pandangan, konsistensi peran dan tanggung jawab untuk keberlanjutan program tersebut.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada saat tahap persiapan dalam mengimplementasikan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan memiliki kendala pada keterlibatan antar pihak terutama keterlibatan, peran dan fungsi secara entitas dari Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga kontribusi dari pemerintah daerah tidak cukup signifikan dalam mendukung program tersebut, kurangnya kolaborasi, keterlibatan, dan komunikasi atau *engagement* antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Lembaga Masyarakat menjadi hambatan dalam pengembangan dan penyelenggaraan kebijakan dan program Kepemimpinan Perempuan Perdesaan selain pemahaman, pandangan yang berbeda terkait isu-isu tersebut, keterbatasan sumberdaya dari pemerintah daerah, serta kurang efektifnya komunikasi antar pihak yang menyebabkan ketidaksepahaman dan ketidakpercayaan dapat menghambat kerjasama yang baik.

Selain beberapa aspek ketidakefektivan di tahap persiapan, peneliti juga menemukan perbandingan yaitu persamaan dan perbedaan efektif tidaknya dari hasil pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, meskipun sudah diberikan *treatment* atau pelatihan yang sama, kualitas fasilitator dan metode pelatihan yang sama namun hasilnya berbeda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala seperti latar belakang peserta, dukungan dari keluarga dan lingkungan, keterbatasan jarak dan waktu, serta benturan budaya patriarki, norma adat dan agama yang kuta mengakibatkan perbedaan kuantitas dan kualitas dari peserta pelatihan. Peserta Lombok Timur lebih banyak mendapat intervensi dari Sekolah Perempuan, lebih mendapatkan dukungan yang positif dari keluarga dan lingkungan masyarakat dibandingkan dengan peserta Lombok Utara dan juga masalah keterbatasan jarak rumah dan

waktu pelatihan yang hanya singkat, serta benturan nilai budaya patriarki, serta norma adat dan agama yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala untuk peserta Kabupaten Lombok Timur tidak mempengaruhi hasil pelaksanaan pelatihan karena masih dinilai cukup efektif dan dapat diatasi oleh peserta wilayah Lombok Timur dibandingkan dengan peserta Lombok Utara.

Selain pada tahap persiapan dan pelaksanaan, juga pada tahap pendampingan terdapat ada kriteria ketidakefektifan/kekurangan dalam mekanisme Monitoring dan Evaluasi Program Pelatihan Kepemimpinan Perempuan yang dijalankan oleh Kementerian PP dan PA di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara yaitu Kurangnya Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang Berkala, Keterlibatan Pihak terkait yaitu Tim dari Lembaga Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses Monitoring dan Evaluasi, Ketidakjelasan Tujuan dan Hasil Monitoring dan Evaluasi,

b. Kriteria Efisiensi

Hambatan dari aspek Sumber Daya Anggaran pada proses pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan adalah :

c. Keterbatasan Anggaran

Kurangnya Fleksibilitas Aturan Anggaran

Hambatan dari Aspek Sumber Daya Manusia pada proses pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yaitu proses pencarian peserta perempuan potensial yang terkendala dengan:

- 1) Latar Belakang Peserta
- 2) Jarak dan waktu
- 3) Dukungan Keluarga dan Lingkungan Masyarakat
- 4) Norma Adat dan Agama

Hambatan tersebut diatas sangat relevan dengan indikator Efisiensi, yang mana menurut Dunn, Efisiensi berarti mencapai hasil dengan menggunakan sumberdaya seperti waktu, tenaga kerja,

anggaran/ uang, atau sumber daya lain. Fokus utamanya adalah pada penggunaan sumber daya yang efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Kriteria Responsivitas

Terdapat perbandingan yaitu muncul kriteria perbedaan tingkat Responsivitas pada hasil pelaksanaan, yaitu respons positif atau tingkat kepuasan peserta Kabupaten Lombok Timur sebagai penerima manfaat lebih besar dibandingkan dengan peserta dari Lombok Utara. Respon tersebut terkait kualitas fasilitator, materi, metode yang cukup baik. Mereka menganggap fasilitator memiliki pemahaman yang mendalam tentang subyek yang diajarkan dan mampu menjelaskan dengan baik serta materi yang diberikan peserta cukup *user friendly*, menarik, dan mudah dipahami, selain itu metode yang partisipatif dan dialogis membuat peserta lebih bersemangat dalam mengikuti proses pelatihan. Perbandingan kriteria perbedaannya pada tingkat Responsivitas wilayah Kabupaten Lombok Utara, beberapa kendala yang dirasakan oleh peserta adalah keterbatasan waktu selama proses pelatihan, dukungan dari suami, keluarga, dan lingkungan masyarakat, benturan budaya patriarki yang tinggi, serta norma adat dan agata yang kental, dan juga peserta yang belum pernah mendapat pelatihan sebelumnya dari Sekolah Perempuan, memiliki keragaman pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, serta kondisi pandemi Covid-19 ternyata memberikan dampak yang kurang responsive dan efektif terhadap hasil pelatihan

3. Rekomendasi Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yang membandingkan diantara kedua wilayah tersebut yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi menggunakan Teori Dunn. Berikut beberapa alternatif rekomendasi kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kinerja Kebijakan agar lebih efektif, efisien, dan responsif.:

- a. Kementerian PP dan PA membentuk “Tim Manajemen Kolaborasi” sistem mekanisme forum/ dialog tim kerjasama formal antar pihak melibatkan unsur pemerintah pusat maupun daerah, organisasi perempuan, pakar, akademisi, sektor swasta, organisasi internasional yang bersifat regular/ berkala.
- b. Kementerian PP dan PA membuat Model Pemberdayaan Perempuan dalam melatih peserta dengan karakteristik yang serupa di kalangan akar rumput di seluruh Indonesia, seperti: Sekolah Perempuan.
- c. Kementerian PP dan PA membangun mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang berkala dan terus-menerus selama program berjalan, hal ini memungkinkan pengukuran dampak jangka panjang dari program dan identifikasi perubahan yang perlu dilakukan selama pelaksanaan program.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran untuk kepentingan Akademik dan Praktisi:

1. Akademisi
  - a. Akademisi dapat melakukan penelitian lanjutan dengan mengembangkan penelitian kuantitatif melalui desain survei dan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden dua wilayah tersebut, karena kelemahan dari penelitian kualitatif lebih melibatkan penafsiran/ interpretasi dari peneliti sendiri, sehingga agar meminimalisir resiko subjektivitas hasil penelitian, maka dengan membuat pertanyaan yang mencakup latar belakang, tingkat dukungan keluarga, atau faktor lain agar dapat memberikan analisis statistik yang lebih dalam tentang pengaruh latar belakang peserta, dukungan keluarga, dan faktor lainnya terhadap efektivitas program kepemimpinan perempuan dengan melihat perbandingan di kedua wilayah yaitu daerah Lombok Timur dan Lombok Utara atau daerah lainnya.

- b.** Akademisi dapat mengembangkan teori yang lebih spesifik atau model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja program kepemimpinan perempuan dengan perbandingan di kedua wilayah perdesaan tersebut yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, jika terdapat bukti bahwa kepemimpinan perempuan berdampak positif, penelitian evaluasi kebijakan ini menjadi mendesak untuk lebih merancang evaluasi kebijakan yang mendukung tidak hanya jumlah tetapi juga kualitas kepemimpinan perempuan di level *grassroot*.

2. Praktisi

- a.** Praktisi dapat melakukan perbaikan dengan meningkatkan kolaborasi antar pihak terkait melalui forum dialog formal yaitu berupa wadah Tim Manajemen Kolaborasi yaitu menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan berbagai pihak secara efektif dan efisien dalam konteks formal yaitu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat implementasi program kepemimpinan perempuan perdesaan;
- b.** Praktisi memastikan peserta mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perbandingan di kedua wilayah tersebut yaitu Lombok Timur dan Lombok Utara, termasuk isu dukungan keluarga, aksesibilitas pelatihan, dan penyesuaian program berdasarkan latar belakang peserta;
- c.** Praktisi dapat membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkala dan terus-menerus selama program berlangsung dan membuat perubahan yang diperlukan selama pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2017). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adhikari, M., R. Thapa., R. M. Kunwar., H. P. Devkota, dan P. Poudel. 2019. Ethnomedicinal Uses of Plant Resources in the Machhapuchchhre Rural Municipality of Kaski District, Nepal. Vol. 6 (69): 1-30.
- A.G Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- AG, Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfiyah, N. I., & Tini, D. L. R. (2021). The Role of Women Village Heads in Decision Making Process in Lembung Timur Village. *Journal of Local Government Issues*, 4(2), 90–105. <https://doi.org/10.22219/logos.v4i2.15413>
- A Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Anderson, James A. (1975). *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, (2020). *Pendataan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan gender Tahun 2020-2022*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.
- Beaman, L., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2012). *Female leadership raises aspirations and educational attainment for girls: A policy experiment in India*. *Science*, 335(6068), 582–586. <https://doi.org/10.1126/science.1212382>

- Bem, S.L. (1981). *Gender Schema Theory : A Cognitive account of sex typing source*. Psychological review, 88 354 [Online] [www.webster.edu/~woolflm/sandrabem.htm](http://www.webster.edu/~woolflm/sandrabem.htm) tanggal akses : 20 Juni 2023
- Carsten Anckar (2018) *On the Applicability of the Most Similar Systems Design and the Most Different Systems Design in Comparative Research* International Journal of Social Research Methodology 11(5):389-401 DOI:10.1080/13645570701401552
- Chatterjee, S. (2016). *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES & SOCIAL STUDIES Leadership , Women Leadership and Rural Development ( With Special Reference to Panchayati Raj in India ). March.*
- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). *Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. Econometrica*, 72(5), 1409–1443. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x>
- Djaali, Mulyono, P., & Ramly. (2000). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PPs UNJ.
- Dunn, N. William. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Dye, Thomas R. (2017). *Understanding public policy (15th Ed.)*. New Jersey: Pearson Education Inc.

- Eagly, Alice H. dan Blair T. Jhonson. (1990). *Gender and Leadership Style: A Meta Analysis*. Psychological Bulletin, vol 108, no. 2, (1990), 233-256.
- Edwards III, George C. dan Ira Sharkansky (1980), *Implementing public policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Ely, R. J., Ibarra, H., & Kolb, D. M. (2011). *Taking Gender Into Account: Theory and Design for Women's Leadership Develo...: Discovery Service for American College of Education. Academy of Management Learning & Education*, 10(3), 474–493. <http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=f9c5eb67-fe3b-4bb0-97bd-0e6e5319a282@sessionmgr4003&hid=4208>
- Emzir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fitriyah, K., Kantun, S., & Sukidin. (2019). *The strategy of the women's leadership (a case study of the head village in Puger Subdistrict)*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 243(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/243/1/012088>
- Friedrich, Carl J. (1969). *Man and His Government*. Newyork:McGraw-Hill.
- Frederickson dan Hart. (2003). *Kebijakan Publik dan Formulasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Garbuja, B. P., & Pasa, R. B. (2016). *Role of Technical and Vocational Education and Training in Women Empowerment: A Case from Bima VDC of Myagdi District, Nepal*. *Journal of Training and Development*, 2(August 2016), 33–41. <https://doi.org/10.3126/jtd.v2i0.15436>
- Gilani, P., Rook, C., Razeghi, Y., & Carr, M. (2022). *Swimming against the current: Negotiating leadership challenges for women in Iran*. *Leadership*, 18(1), 162–185. <https://doi.org/10.1177/17427150211047102>
- Gronlund, N. E. dan Linn, R. L. (2000). *Measurement and Assessment in Teaching*. Upper Saddle River: Prentice-Hall

- Hadari Nawawi. (1987). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hadi, Sutrisno. (1986). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harold D. Laswell, Abraham Kaplan. (1970). *Power and Societ*. New Haven: Yale University Press.
- Hasan, Iqbal M. (2002). *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Henriyani, E. (2019). *Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik*. In *MODERAT : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1, Nomor 4, hal. 657–666).
- Jacka, T. (2008). Increasing women's participation in Village Government in China: Is it worth it? *Critical Asian Studies*, 40(4), 499–530. <https://doi.org/10.1080/14672710802505265>
- Kanter, Rosabeth Moss. (1977) . *Men and Women of the Corporation*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartini, Kartono. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju 1996 : h.32.
- KAPAL Perempuan, dkk. *Buku Daya Perempuan Akar Rumput, Kepemimpinan Perempuan untuk Perubahan* (2020), Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). *Kajian Kebijakan Kepemimpinan Perempuan dalam Menggerakkan Industri Rumah Tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: PT Bermitra Inovatif Sistem Andalan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021). Modul Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender

- Kementerian PP dan PA. 2018. Buku Pedoman Panduan Praktis Memahami PPRG di Daerah
- Mead, George H. (1972). *Mind, Self, and Society: From The Standpoint of A Social Behavioris*. London: The University of Chicago Press.
- Nazir. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indoensia
- Nawawi, Hadari. (1987). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Pers.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan. Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. (p. 898). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pal, Leslie Alexander.1954. *Public Policy Analysis: an Introduction*, Toronto: Methuen
- Purwanto dan Atwi Suparman. (1999). *Evaluasi Program Diklat*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, STIA-LAN Press.
- Rossi, Peter Henry, 1921-. *Evaluation: a systematic approach / by Peter H. Rossi, Mar W. Lipsey, Howard E. Freeman.— 7th ed.*
- Samodra Wibawa, Yuyun Purbokusuma, Agus Pramusinto.1994. *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Kajian Kebijakan Kepemimpinan Perempuan dalam Menggerakkan Industri Rumahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Stake, E. Robert. (1976). *Center For Instructional Research Ana Curriculum Evaluation Countenance*. Illinois: University of Illinois.

- Sugiyanto, E. K. (2020). Women Leadership Paradigm: Pro and Contra on Women As Leaders in Various Views. *Economics and Business Solutions Journal*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.26623/ebsj.v4i1.2241>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suharto, E. (Ed.). (2004). *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Balitbangsos Departemen Sosial RI.
- Supiandi Yusuf, 2020, *Kajian Model Pilot Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Desa*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
- Suparno.A.S., 2001, *Membangun Kompetensi Dasar*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
- Sutanto, E. M., & Aveline, V. (2021). Women leadership and its association to individual characteristics, social support, and diversity of work environment. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 807–817. <https://doi.org/10.33736/ijbs.3760.2021>
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: UNDIP.
- Topalova, P., & Duflo, E. (2015). Unappreciated Service : Performance , Perceptions , and Women Leaders in India Unappreciated Service : Performance , Perceptions , and Women Leaders in India. *Manuscript, Department of Economics ...*, March. <https://www.almendron.com/tribuna/wp-content/uploads/2016/03/unappreciated-service-performance-perceptions-and-women-leaders-in-india.pdf>
- Vaughn Hokanson, (2017) *Book Review: Deborah Rhode, Women and Leadership*, 9 ConLawNOW, 1000

- Wandia, M. E., & Njoroge, J. (2022). Effect of Social- Cultural Values on Women Leadership in Murang'a County Government. *Journal of Public Policy & Governance*, 6(1), 35–45. <https://doi.org/10.53819/81018102t4034>
- Wells, K., & Fleshman W, J. (2020). Women in leadership. *SA Pharmaceutical Journal*, 87(5), 42
- Widodo, Joko. (2008) *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- Winarno, Budi (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- World Economic Forum. (2020). *The Global Gender Gap Report*. World Economic Forum.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*convention on the elimination of All forms of discrimination against women*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024\.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Keputusan Deputi Bidang Kesetaraan Gender No.5 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Deputi Kesetaraan Gender terkait Kepemimpinan Perempuan Perdesaan merupakan Salah satu Program Prioritas Negara Agenda RPJMN 2020-2024 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

**LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN**

NO	Jabatan <i>key informan</i>	Unit Kerja	Keterlibatan dalam Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Informasi yang ingin di gali
1	Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum	Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kemen PPPA	Pejabat Pembuat dan Perancang Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan serta melakukan evaluasi Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di liat dari Aspek: 1. Jumlah peserta perempuan yang akan menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender
2	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya/Muda pada Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum	Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kemen PPPA	Pejabat Pembuat dan Perancang Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan serta melakukan evaluasi Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	2. Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam memahami dan menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa (misal: Musrenbang Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll);
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB Provinsi NTB	Dinas PP dan PA Provinsi NTB	Pejabat pengampu	3. Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam Menyusun usulan-usulan program di 4 Bidang kewenangan desa

NO	Jabatan <i>key informan</i>	Unit Kerja	Keterlibatan dalam Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Informasi yang ingin di gali
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur	Pejabat pengampu	<p>yang responsive gender; dan</p> <p>4. Memastikan kapasitas peserta pemimpin dalam memahami cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa khususnya RKPD Desa dan APBD Desa.</p> <p>5. Bagaimana Anggaran Pelatihan apakah mencukupi?</p>
4	Kepala Bidang PP dan PUG dan PP	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur	Pejabat pengampu	<p>6. Komitmen Tokoh Masy/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab</p> <p>7. Bagaiman Dukungan dari pasangan/suami?</p> <p>8. Apakah ada keterlibatan laki-laki?</p>
5	Pimpinan Lembaga Masyarakat	Kapal Perempuan, PEKKA, KPI, PPSW	Bertanggungjawab atas Pelaksanaan Kebijakan	<p>9. Apakah ada hambatan/ tantangan selama melaksanakan pelatihan?</p>

NO	Jabatan <i>key informan</i>	Unit Kerja	Keterlibatan dalam Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Informasi yang ingin di gali
	Pemerhati Perempuan		Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	10. Apa rekomendasi/ upaya atas kebijakan yang sama di tahun-tahun selanjutnya.?
6	Tenaga Pengajar/ Fasilitator daerah Pelatihan, Tokoh Masyarakat/Adat/ Agama di Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur	Kapal Perempuan di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur	Memberikan Materi Pelatihan	
7	Tenaga Administrasi Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur	Mengadministrasikan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	

NO	Jabatan <i>key informan</i>	Unit Kerja	Keterlibatan dalam Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Informasi yang ingin di gali
8	Peserta Perempuan Desa Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur (Penerima Manfaat)	Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur	Penerima Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Materi lembar balik mudah dipahami?</li> <li>2. Bagaimana mekanisme fasilitator daerah dalam memberikan materi? apakah mudah dipahami?</li> <li>3. Apa manfaat pelatihan bagi bagi Anda?</li> <li>4. Apakah masalah keluarga / isu ketidakadilan gender terselesaikan setelah mengikuti pelatihan?</li> <li>5. Apakah ada hambatan/ tantangan selama mengikuti pelatihan?</li> <li>6. Apakah ada Usulan/Rekomendasi kedepan?</li> </ol>

Tabel Key Informan

TRANSKRIP WAWANCARA	
Kode Informan	A1 (Pejabat Kementerian)
Identitas Informan	
Pekerjaan	
Tempat Wawancara	
Waktu	

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara) dilihat dari Aspek:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yang sudah dilaksanakan di Kementerian/ Lembaga Masyarakat??
2. Alasan pemilihan Lokus Pelatihan di NTB (Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara)?
3. Bagaimana proses persiapan sampai dengan monitoring evaluasi? yang terlihat menonjol? Dan dimana tantangannya?
4. Jumlah peserta perempuan yang akan menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender?
5. Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam memahami dan menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa (misal: Musrenbang Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll);
6. Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam Menyusun usulan-usulan program di 4 Bidang kewenangan desa yang responsive gender; dan
7. Memastikan kapasitas peserta pemimpin dalam memahami cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa khususnya RKPD Desa dan APBD Desa.
8. Bagaimana Anggaran Pelatihan apakah mencukupi?
9. Komitmen Tokoh Masyarakat/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab (terutama di Kab Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)?
10. Bagaimana Dukungan dari pasangan/suami?
11. Apakah ada keterlibatan laki-laki?
12. Apakah ada hambatan/ tantangan selama melaksanakan pelatihan?
13. Apa rekomendasi/ upaya atas kebijakan yang sama di tahun-tahun selanjutnya?

TRANSKRIP WAWANCARA	
Kode Informan	A2 (Pejabat Daerah)
Identitas Informan	
Pekerjaan	Dinas PP dan PA Provinsi dan Kabupaten
Tempat Wawancara	
Waktu	

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara) dilihat dari Aspek:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yang sudah dilaksanakan di Kementerian/ Lembaga Masyarakat??
2. Alasan pemilihan Lokus Pelatihan di NTB (Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara)?
3. Bagaimana Kondisi Wilayah, Penduduk, Kemiskinan, dan Isu Gender disini?
4. Bagaimana proses persiapan sampai dengan monitoring evaluasi? yang terlihat menonjol? Dan dimana tantangannya?
5. Jumlah peserta perempuan yang akan menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender?
6. Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam memahami dan menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa (misal: Musrenbang Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll);
7. Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam Menyusun usulan-usulan program di 4 Bidang kewenangan desa yang responsive gender; dan
8. Memastikan kapasitas peserta pemimpin dalam memahami cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa khususnya RKP Desa dan APBD Desa.
9. Bagaimana Anggaran Pelatihan apakah mencukupi?
10. Komitmen Tokoh Masyarakat/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab (terutama di Kab Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)?
11. Bagaimana Dukungan dari pasangan/suami?
12. Apakah ada keterlibatan laki-laki?
13. Apakah ada hambatan/ tantangan selama melaksanakan pelatihan?
14. Apa rekomendasi/ upaya atas kebijakan yang sama di tahun-tahun selanjutnya?

TRANSKRIP WAWANCARA	
Kode Informan	A3
Identitas Informan	Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan (KAPAL, PEKKA, PPSW, KPI)
Pekerjaan	
Tempat Wawancara	
Waktu	

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara) dilihat dari Aspek:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yang sudah dilaksanakan di Kementerian/ Lembaga Masyarakat??
2. Alasan pemilihan Lokus Pelatihan di NTB (Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara)?
3. Bagaimana proses persiapan sampai dengan monitoring evaluasi? yang terlihat menonjol? Dan dimana tantangannya?
4. Jumlah peserta perempuan yang akan menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender?
5. Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam memahami dan menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa (misal: Musrenbang Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll);
6. Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam Menyusun usulan-usulan program di 4 Bidang kewenangan desa yang responsive gender; dan
7. Memastikan kapasitas peserta pemimpin dalam memahami cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa khususnya RKPD Desa dan APBD Desa.
8. Bagaimana Anggaran Pelatihan apakah mencukupi?
9. Komitmen Tokoh Masyarakat/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab (terutama di Kab Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)?
10. Bagaimana Dukungan dari pasangan/suami?
11. Apakah ada keterlibatan laki-laki?
12. Apakah ada hambatan/ tantangan selama melaksanakan pelatihan?
13. Apa rekomendasi/ upaya atas kebijakan yang sama di tahun-tahun selanjutnya?

TRANSKRIP WAWANCARA	
Kode Informan	A4
Identitas Informan	Tenaga Pengajar/ Fasilitator daerah Pelatihan, Tenaga Administrasi Pelatihan, dan Tokoh Masyarakat/Adat/ Agama di Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur
Pekerjaan	
Tempat Wawancara	
Waktu	

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara) dilihat dari Aspek:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan yang sudah dilaksanakan di Kementerian/ Lembaga Masyarakat??
2. Bagaimana Kondisi Wilayah, Penduduk, Kemiskinan, dan Isu Gender disini?
3. Alasan pemilihan Lokus Pelatihan di NTB (Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara)?
4. Bagaimana proses persiapan sampai dengan monitoring evaluasi? yang terlihat menonjol? Dan dimana tantangannya?
5. Jumlah peserta perempuan yang akan menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender?
6. Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam memahami dan menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa (misal: Musrenbang Desa, Musyawarah Desa, Tim Perencana RPJM Desa, dll);
7. Memastikan kapasitas peserta perempuan dalam Menyusun usulan-usulan program di 4 Bidang kewenangan desa yang responsive gender; dan
8. Memastikan kapasitas peserta pemimpin dalam memahami cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa khususnya RKPD Desa dan APBD Desa.
9. Bagaimana Anggaran Pelatihan apakah mencukupi?
10. Komitmen Tokoh Masyarakat/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab (terutama di Kab Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)?
11. Bagaimana Dukungan dari pasangan/suami?
12. Apakah ada keterlibatan laki-laki?
13. Apakah ada hambatan/ tantangan selama melaksanakan pelatihan?
14. Apa rekomendasi/ upaya atas kebijakan yang sama di tahun-tahun selanjutnya?

TRANSKRIP WAWANCARA	
Kode Informan	A5
Identitas Informan	Peserta Perempuan Desa Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur (Penerima Manfaat)
Pekerjaan	
Tempat Wawancara	
Waktu	

Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan di Provinsi NTB (Kab. Lombok Timur dan Kab Lombok Utara) dilihat dari Aspek:

1. Bagaimana proses Ibu dipilih menjadi peserta pelatihan di Provinsi NTB (Kab. Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)? apakah bisa diceritakan?
2. Bagaimana kesan dan Pesan selama mengikuti pelatihan di Provinsi NTB (Kab Lombok Timur dan Kab Lombok Utara)?
3. Apakah Materi lembar balik mudah dipahami?
4. Bagaimana mekanisme fasilitator daerah dalam memberikan materi? apakah mudah dipahami?
5. Apa manfaat pelatihan bagi bagi Anda?
6. Apakah masalah keluarga / isu ketidakadilan gender terselesaikan setelah mengikuti pelatihan?
7. Apakah ada hambatan/ tantangan selama mengikuti pelatihan?
8. Apakah ada manfaatnya setelah mengikuti pelatihan?
9. Komitmen Tokoh Masyarakat/ Agama, Adat, Pemda Provinsi dan Kab?
10. Bagaimana Dukungan dari pasangan/suami?
11. Apakah ada keterlibatan laki-laki?
12. Apakah ada Usulan/ Rekomendasi kedepan untuk program ini?
13. Apakah ada Usulan/ Rekomendasi kedepan untuk Kementerian?